

Pejabat BI Disanksi

Terima Uang Rp 1 Miliar

JAKARTA - Pejabat Bank Indonesia (BI) akhirnya tersentuh kasus Bank Century. Dari pemeriksaan internal BI terungkap bahwa Deputy Gubernur Budi Mulya telah melanggar kode etik pegawai dan pejabat bank sentral setelah menerima uang Rp 1 miliar dari bekas pemegang saham Bank Century, Robert Tantular.

Budi sudah menjalani pemeriksaan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI. Dalam pemeriksaan itu Budi mengakui adanya aliran uang tersebut. "Kesimpulan sementara adalah mengenai (pelanggaran) etika," kata Juru Bicara BI Difi A. Johansyah di Jakarta kemarin (3/10).

Budi diperiksa secara internal terkait dengan proses audit forensik yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang aliran dana Bank Century. Difi mengatakan, saat ini BI baru fokus pada hasil investigasi internal. Untuk hasil audit forensik, bank sentral menyerahkan semuanya kepada BPK. "Prinsipnya, kita tunggu hasil akhir audit forensik dari BPK," kata Difi.

Kode etik BI poin 3 berbunyi: "Pegawai dilarang meminta atau menerima, memberi persetujuan untuk menerima,

mengizinkan atau membiarkan keluarga untuk meminta atau menerima fasilitas dan hal-hal lain yang dapat dinilai dengan uang dari perorangan atau badan yang diketahui atau patut diduga bahwa hal tersebut mempunyai hubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jabatan atau pekerjaan pegawai yang bersangkutan."

Karena melanggar kode etik, sebagian kewenangan Budi dilucuti. Sebagai dewan gubernur yang dikenal jago moneter, Budi kini tinggal membawahkan bidang kesekretariatan, unit khusus penyelesaian aset museum BI, serta kantor BI (KBI). Dua bidang prestisius yang selama ini berada di bawah kendali Budi, yakni Direktorat Pengelolaan Moneter dan Direktorat Pengelolaan Devisa, dialihkan ke deputy gubernur yang lain.

Direktorat Pengelolaan Moneter saat ini berada di bawah kendali Deputy Gubernur Halim Alamsjah. Sedangkan Direktorat Pengelolaan Devisa dikendalikan Hartadi A. Sarwono. "Pembidangan baru ini berlaku mulai 19 September 2011," kata Difi.

◆ Ke Halaman 7 Kolom 5

Pejabat BI Disanksi

Sambungan dari halaman 1

Dalam pemeriksaan internal, uang Rp 1 miliar yang diklaim sebagai utang oleh Budi Mulya cair sekitar September 2008 atau hampir bersamaan dengan proses penyaluran FPJP (fasilitas pendanaan jangka pendek) kepada Bank Century. FPJP tahap pertama diberikan BI kepada Bank Century pada 30 Oktober 2008 sebesar Rp 1 triliun.

Budi Mulya diangkat sebagai Deputy Gubernur BI pada 6 Oktober 2007 dan dilantik pada 29 November 2007. Pria kelahiran Bogor, Jawa Barat, 29 Juli 1954 itu pernah menjadi direktur pengelolaan moneter (2003-2006) dan direktur perencanaan strategis dan hubungan masyarakat (2006-2007). Wakil Ketua BPK Hasan Bisri menolak berkomentar mengenai hasil audit forensik. Dia hanya mengatakan audit forensik aliran dana Bank Century akan diserahkan ke DPR paling lambat November ini.

Anggota Komisi III DPR yang juga anggota tim pengawas

(timwas) kasus Bank Century Bambang Soesatyo mengatakan, informasi bahwa Budi Mulya diduga telah menerima aliran dana Rp 1 miliar dari Robert Tantular harus segera ditindaklanjuti KPK. Sebab, hal tersebut bisa menjadi pintu pembuka adanya unsur tindak pidana dalam kasus Century. Menurut Bambang, timwas telah mendengar dan mengetahui aliran dana itu berdasar keterangan sementara audit forensik BPK. "Informasi itu sudah disampaikan juga oleh BPK kepada KPK," kata Bambang kemarin.

Keterangan sementara dari BPK tersebut, tutur Bambang, bisa memutarbalikkan anggapan KPK yang selama ini belum menemukan dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus Bank Century. Menurut dia, ternyata terbukti, ada motif orang yang mempersiapkan dan merumuskan bailout Bank Century yang berhubungan dengan mantan pemegang saham Century. "KPK harus bergerak ke samping dan ke atas," tegasnya.

Bambang menjelaskan,

pasca laporan itu, setidaknya sudah ada langkah awal yang dilakukan KPK. Saat ini KPK mempelajari adanya pengeluaran dana cash bailout Bank Century.

BPK juga sudah menyita buku log milik BI yang berisi pencairan dana cash terkait dengan kasus Century. "Untuk metode penyelamatan bank, tidak lazim melalui cash," ucap Bambang. Dalam hal ini, KPK harus menelusuri ke mana alamat dana cash itu menuju.

Menurut dia, hasil audit forensik BPK nanti tidak menutup kemungkinan akan menemukan fakta-fakta lain. Sebab, proses audit BPK baru berjalan 45 persen. "BPK sudah menjanjikan pada November hasil audit forensik selesai," tandasnya.

Rencananya, timwas Century menjadwalkan melakukan uji silang lagi dengan KPK. Itu dilakukan untuk memantau seberapa jauh proses penelusuran hasil sementara dari temuan BPK tersebut. "Untuk jadwal terdekat, mungkin dengan kejaksaan," ujarnya. (sof/c2/bay/agm)